

BAB I

PENDAHULUAN

1.1. Latar Belakang Masalah

India merupakan salah satu negara dengan populasi terbanyak kedua di dunia setelah Tiongkok (World Bank, 2017). Populasi India juga terdiri dari banyak suku bangsa, agama¹, dan ras yang berbeda. Berdasarkan bahasa, tak kurang dari 121 bahasa digunakan di India dengan 22 bahasa resmi/*scheduled languages*² dan 99 bahasa yang diakui pemerintah/*recognized minority languages*³. Kemajemukan yang terdapat pada masa Republik India modern, merupakan sesuatu hal alamiah yang sudah diterapkan melalui adanya keterbukaan yang dapat dilihat dari sudut pandang historis. Hal ini misalnya dapat dibuktikan dengan melihat keterbukaan entitas lokal yang terdapat di India sejak masa sebelum era penjajahan. Wilayah-wilayah *princely states*⁴ menerima kehadiran berbagai suku bangsa dengan berbagai macam tujuan seperti berdagang, mencari rempah-rempah hingga mencari perlindungan (Singh, 2006). Keterbukaan kerajaan kecil dalam menerima orang-orang asing yang membutuhkan perlindungan secara khusus ditunjukkan dengan penerimaan penguasa lokal di pesisir Gujarat terhadap pelarian orang-orang *Parsi*⁵ yang lari saat penaklukan arab di Persia (Hodivala, 2017).

Penerimaan India terhadap keberagaman pun dilanjutkan hingga zaman kemerdekaan dari Inggris, dimana diadopsi sistem sekuler yang terbuka dan terbebas dari campur tangan dominasi agama dalam pemerintahan

¹ Berdasarkan sensus terakhir tahun 2011, disebutkan bahwa jumlah umat beragama berdasarkan persentasenya adalah Hindu (79,80%), Muslim (14,23%), Kristen (2,30%), Sikh (1,72%), Budha (0,70%), Jain (0,37%), Sisanya tak berafiliasi dengan agama (0,03 %). (Census Bureau of India, 2011)

² Bahasa yang diakui Pemerintah India sebagai bahasa resmi yang digunakan dalam pemerintahan negara-negara bagian/*states*. Contohnya : Negara Bagian Uttar Pradesh menggunakan Bahasa Hindi, Tamil Nadu menggunakan Bahasa Tamil, Karnataka menggunakan Bahasa Kannada, dll. (Konstitusi India, 1951)

³ Bahasa Daerah yang diakui keberadaannya oleh Pemerintah India, biasanya jumlah penutur asli tidak sebesar jumlah penutur bahasa resmi di sebuah negara bagian. Contoh : Uttar Pradesh menggunakan Bahasa Hindi sebagai bahasa resmi, namun tetap mengakui keberadaan bahasa lainnya seperti Urdu, Maithili, Marwari di wilayahnya. (Konstitusi India, 1951)

⁴ Negara vasal/ negeri kerajaan-kerajaan kecil yang merupakan bawahan dari suatu kerajaan besar (Ramusack, 2004)

⁵ Kelompok penyembah api yang menganut agama Zoroaster, yang berasal dari Persia sebelum masuknya penaklukan oleh Orang-orang Arab (Boyce, 2002)

sebagaimana tercantum dalam pembukaan konstitusinya tahun 1949 “*We, The People of India, Having Solemnly Resolved to Constitute India Into a Sovereign Socialist Secular Democratic Republic And to Secure to All Its Citizens*”. Pengadopsian sistem sekuler yang demikian, mengarahkan kebijakan pemerintah India untuk bersikap netral dalam menjalankan pemerintahan. Sistem ini menjadikan entitas negara untuk tidak mendasarkan agama sebagai dasar dalam pengambilan kebijakan. Hal tersebut memungkinkan terjaganya pluralitas yang ada di dalam masyarakat India (Embree, 1972). Keberadaan sistem pemerintahan berlandaskan asas sekuler cenderung menjadi sebuah kebutuhan bagi republik India yang terdiri atas banyak entitas majemuk (Rehman, 2016).

Pasca kemerdekaan di tahun 1947, kebijakan yang didasarkan pada nilai-nilai pluralisme tidak hanya ditunjukkan pemerintah India secara internal saja. Kebijakan yang berasaskan keterbukaan terhadap kemajemukan juga diimplementasikan secara eksternal. Hal ini misalnya dapat terlihat dari keterbukaan Pemerintah India terhadap para pencari suaka dan para pengungsi terutama mereka yang terusir dari negara asalnya. Bentuk kebijakan ini sudah sejak awal diterapkan dengan hadirnya pengungsi pasca partisi India Pakistan pada tahun 1947, pengungsi Tibet pada tahun 1960-an, pengungsi Bangladesh pada 1971, hingga Pengungsi Minoritas Hindu & Sikh dari Pakistan (Sriram, 2015). Beberapa kelompok pengungsi asing lainnya juga mendapatkan penerimaan dari pemerintah India seperti Pengungsi Afghanistan pada era Soviet, Pengungsi Tamil pada konflik Sri Lanka, hingga penerimaan awal terhadap pengungsi Rohingya pada tahun 2015-2017 (Jha, 2018). Para pengungsi yang datang kebanyakan melihat India sebagai *Safe Haven*⁶ dikarenakan ketiadaan ancaman seperti yang terdapat di tanah air mereka, dan secara jarak merupakan pilihan yang dekat bagi para pengungsi dari wilayah-wilayah konflik di Asia.

⁶ Secara umum istilah *Safe Haven* merujuk pada sebuah “Tempat yang aman dan terbebas dari ancaman » yang menjadi tujuan sementara para pencari suaka dan pengungsi . Definisi lebih jauh tentang *Safe Haven* dikeluarkan oleh UNHCR pada tahun 1991, dimana istilah ini berkembang menjadi *Safe Country* yang terbagi atas (a)*Safe Country of Origin* yang secara definisi mengacu pada negara asal pengungsi dan (b) *Safe Haven in Asylum* bagi para pencari suaka / pengungsi (UNHCR, 1991).

Data terakhir yang dikeluarkan oleh UNHCR tahun 2016 menyebutkan bahwa India setidaknya menerima pengungsi sebanyak 209.234 jiwa. Adapun komposisi pengungsi menurut negara asalnya yang dibantu oleh UNHCR adalah Myanmar sebanyak 18.914 Jiwa, Afghanistan sebanyak 13.381, Somalia sebanyak 672, dan pengungsi asal negara lainnya sebanyak 1483 jiwa. Sementara itu juga terdapat beberapa kelompok pengungsi lainnya secara resmi mendapatkan bantuan dari Pemerintah India, terutama yang berasal dari negara-negara tetangga yang memiliki ikatan yang kuat seperti Pengungsi Tibet sebanyak 64.689 dan pengungsi Tamil dari Sri Lanka sebanyak 110.095 jiwa.

Dari langkah-langkah konkrit seperti yang disebutkan sebelumnya, India sebagai negara yang membuka pintunya terhadap para pencari suaka dan pengungsi sendiri seringkali mengklaim aksinya sebagai sebuah kebijakan yang baik dan patut dicontoh (Ramachandran, 2013). Walaupun demikian, India sebenarnya bukan merupakan negara yang meratifikasi Konvensi-konvensi Internasional Terkait Pengungsi seperti *Convention Relating to the Status of Refugees*⁷ dan protokol tambahan tahun 1967. Meskipun demikian India merupakan anggota yang aktif dalam UNHCR dalam mengadvokasi perlindungan kepada pengungsi itu sendiri, terutama dalam kaitannya terhadap prinsip *non-refoulement* (Nair, 2018). Prinsip ini yang dalam hukum internasional kemudian menjadi dasar kewajiban normatif bagi negara untuk menerima datangnya pengungsi sekaligus melarang memulangkan kembali mereka sebelum situasi asal tempat mereka dirasa cukup aman.

Di dalam hukum nasionalnya, India sendiri tidak memiliki hukum yang secara spesifik mengatur tentang keberadaan pengungsi. Perlakuan terhadap pengungsi dan para pencari suaka selama ini cenderung disamakan dengan perlakuan pemerintah India terhadap warga negaranya itu sendiri sebagaimana tercantum dalam Konstitusi Nasional India, seperti perlindungan yang sama di mata hukum dalam pasal 16, perlindungan atas

⁷ Konvensi PBB tentang Perlindungan Terhadap Pengungsi Tahun 1951 . dapat dilihat lebih jauh dalam laman : <https://www.unhcr.org/4ca34be29.pdf>

dasar kebebasan pribadi dan hak milik dalam pasal 21, kebebasan beragama dalam pasal 25 dan hak keamanan sosial & pendidikan dalam bagian ke-III.

Kebijakan Pemerintah India yang selama ini memilih membuka pintunya terhadap datangnya pengungsi dan pencari suaka mulai menghadapi tantangan sejak datangnya gelombang pengungsi Rohingya dari Myanmar secara besar-besaran (Chandran, 2017). Kedatangan jumlah pengungsi ini sebelumnya disebabkan oleh serangkaian gerakan diskriminasi rasial secara sistematis yang didukung oleh elit berkuasa dari kelompok militer Myanmar yang melakukan pembumihangusan desa-desa yang dihuni oleh kaum Rohingya, pembunuhan, dan pengusiran secara paksa (Human Rights Watch, 2017). Menurut laporan dari HRW tersebut, peristiwa ini menyebabkan 671.000 orang Rohingya pergi mencari suaka meninggalkan Myanmar. Para pengungsi ini kemudian melarikan diri ke berbagai negara seperti Bangladesh, India, Indonesia, Malaysia, Thailand, Pakistan, hingga Arab Saudi dan Uni Emirat Arab (BBC, 2018). Dari laporan resmi UNHCR tahun 2017, India setidaknya diperkirakan menampung sebanyak 40.000 pengungsi Rohingya, yang mana hanya 16.500 dari jumlah pengungsi yang sudah diberikan kartu pengungsi sementara.

Namun sejak isu pengungsi Rohingya mulai kembali memanas, Pada tahun 2018 Pemerintah India ternyata melakukan deportasi terhadap sejumlah pengungsi Rohingya kembali ke Myanmar dengan alasan tuduhan memasuki teritori India tanpa izin (Das, 2019). Peristiwa ini kemudian kembali terjadi pada bulan Januari 2019, di mana Deportasi dilakukan oleh Pemerintah India terhadap para pengungsi Rohingya dari wilayah Assam, atas tuduhan serupa (Husain, 2019). Keberadaan fenomena ini kemudian akhirnya menimbulkan kecemasan dan ketakutan bagi pengungsi Rohingya di India (Kuchay, 2018) yang pada akhirnya membuat sebagian dari mereka mencoba menyeberang ke Bangladesh (M.S., 2019). Tentunya tindakan deportasi yang dilakukan oleh pemerintah menuai reaksi kelompok aktivis dari perwakilan HAM PBB yang kemudian mengutuk tindakan itu (OHCHR, 2019).

Beberapa penelitian sebelumnya sudah cukup banyak yang membahas tentang keberadaan dan penerimaan pengungsi di India. Penelitian yang

ditulis oleh Vivek Kumar (2017) membahas keberadaan pengungsi dari sudut pandang hukum. Dalam penelitian yang berjudul “*A study of refugee’s in India: The legal perspective*” dibahas tentang ketiadaan legalitas yang spesifik mengatur tentang permasalahan pengungsi (V. Kumar, 2017). Penelitian ini termasuk komprehensif dalam menjelaskan ketiadaan hukum spesifik tentang pengungsi, namun pembahasan masih dilihat dari sudut pandang tradisional yang lebih terkait kepada keamanan nasional India itu sendiri. Penelitian lain yang ditulis oleh Namrata Gupta (2017) mengungkapkan alasan India menolak keanggotaan dalam *Convention Relating to the Status of Refugees* tetapi juga melihat komitmen India dalam menghadapi masalah pengungsi yang datang di wilayahnya. Penelitian ini lebih membahas bagaimana alasan domestik India dalam menerima pengungsi sebagai sebuah kebijaksanaan daripada sebuah “kebijakan”.

Penelitian yang lebih spesifik seperti yang berjudul “*Sri Lankan Tamil Refugees in India: Conceptual Framework of Repatriation Success*” ditulis oleh Miriam George, et. al (2016). Penelitian ini membahas tentang keberhasilan Pemerintah India dengan bantuan UNHCR dalam merepatriasi para pengungsi Tamil Sri Lanka dari India. Penelitian ini sangatlah komprehensif dalam menjelaskan kehadiran pemerintah India dalam menyelesaikan masalah pengungsi di negaranya. Hal ini merupakan suatu hal yang setidaknya dapat dilihat sebagai pelaksanaan rasa tanggung jawab India dalam mengatur pengungsi sampai bisa kembali ke tempat asalnya, dimana hal ini tidak diterapkan secara setara terhadap para pengungsi Rohingya.

Sedangkan Falcone & Wangchuk (2008). Dalam penelitian yang menjelaskan tentang krisis identitas yang melanda generasi muda pengungsi Tibet di India. Literatur ini menjelaskan bahwa meskipun sudah diberikan bantuan dan penerimaan yang baik oleh Pemerintah India, para pengungsi Tibet merasa bukan orang India sehingga hal ini yang menimbulkan krisis identitas dalam diri mereka. Adapun bahasan tentang pengaruh hukum internasional dalam kebijakan pemerintah India terhadap pengungsi ditulis oleh Sanderson (2015) dalam tesisnya “*The Role of International Law in*

Defining the Protection of Refugees in India”. Hal positif yang dapat diambil adalah pembuktian yang cukup baik terutama pengaruh dari keberadaan India dalam posisi penting di UNHCR, namun kebijakan terhadap pengungsi yang diambil oleh India cenderung dipandang negatif.

Kebijakan penerimaan pengungsi di India sendiri sudah sering dijustifikasi oleh banyak penelitian yang sudah ada sebelumnya sebagai bukti dari wujud kebijakan berlandaskan keterbukaan. Sekretaris Jenderal PBB, Antonio Guterres bahkan pernah menyebut dalam pidatonya di Majelis Umum PBB pada 2013 lalu bahwa Kebijakan Pengungsi yang diterapkan India dapat menjadi panutan bagi negara-negara di seluruh dunia dalam membantu penyelesaian masalah pengungsi (Ramachandran, 2013). Keberadaan penerimaan pemerintah India terhadap gelombang sudah dimulai pasca kemerdekaan ketika kedatangan pengungsi akibat partisi India-Pakistan (1947), dilanjutkan dengan kedatangan pengungsi dari Tibet (1950-an), Bangladesh (1960), Afghanistan (1979), Tamil Sri Lanka (1980-1990-an). Dari data yang diperoleh melalui UNHCR pada tahun 2016 juga mencatat setidaknya terdapat beberapa kelompok pengungsi lain seperti yang berasal dari Somalia, Irak, Palestina, Iran, Sudan, Republik Demokratik Kongo, Eritrea hingga Suriah. Dalam kurun waktu (1947-2016) turut menjadi justifikasi bagi India dalam memberlakukan penerimaan pengungsi sebagai sebuah kebijaksanaan daripada sebuah kebijakan (N. Gupta, 2017).

Namun keberadaan deportasi terhadap sejumlah 12 pengungsi Rohingya merupakan sebuah hal yang sama sekali baru dalam penerapan kebijakan pemerintah India yang sebelumnya selalu menerapkan *Open Door Policy* bagi para pengungsi. Alasan yang muncul dari otoritas setempat menyatakan bahwa keberadaan deportasi merupakan sebuah bentuk penegakan dari pelanggaran hukum karena memasuki wilayah India secara ilegal (Doshi, 2018). Hal yang tetap menjadi masalah adalah keberadaan deportasi ini pun ternyata tidak menyelesaikan masalah, dikarenakan status kewarganegaraan mereka pun tidak diakui oleh Myanmar sebagai tempat mereka berasal. Pemerintahan Narendra Modi sebelum memutuskan

kebijakan deportasi pernah menyatakan bahwa Rohingya sendiri merupakan sebuah ancaman bagi keamanan nasional India (Mohanty and Jain, 2017).

Fenomena deportasi terhadap pengungsi memiliki relasi yang dapat dikatakan kurang sejalan dengan kebijakan penerimaan pengungsi yang diterapkan oleh Pemerintah India, terlebih dengan penerimaan India terhadap banyak gelombang pengungsi sejak era kemerdekaannya. Alasan tuduhan memasuki wilayah secara ilegal dan kebijakan deportasi terhadap para pengungsi yang ingin mencari perlindungan karena terjadi diskriminasi terhadap mereka di negara asalnya sendiri menggambarkan sebuah bentuk anomali dari penerapan kebijakan keterbukaan terhadap pengungsi. Keberadaan posisi pengungsi Rohingya yang diposisikan sebagai ancaman keamanan sendiri juga tidak dapat ditelan secara mentah-mentah, dikarenakan ketiadaan bukti yang mendukung klaim tersebut. Jika melihat dari pola penerimaan pengungsi sebelumnya, India pun tetap menerima pengungsi yang berasal dari wilayah dengan konflik yang memiliki resiko keamanan cukup tinggi seperti Afghanistan, Somalia dan beberapa wilayah konflik lainnya yang tentunya menjadi bantahan dari pembenaran alasan deportasi yang hanya berdasarkan alasan keamanan semata. Maka dari itu, Penulis melihat beberapa celah dalam perubahan dalam segi kebijakan terbuka India terhadap pengungsi dan deportasi berdasarkan alasan keamanan. Hal ini pun cenderung bertentangan dengan narasi yang dibangun oleh rezim berkuasa sebelumnya di India yang menganggap kebijakan terbuka terhadap pengungsi sebagai sebuah kebijaksanaan yang diklaim sebagai sesuatu yang baik dan dapat diterima secara normatif.

1.2. Rumusan Masalah

Berdasarkan latar belakang di atas penulis memiliki rumusan masalah; Mengapa pemerintah India yang sebelumnya memiliki kebijakan terbuka terhadap pengungsi, melakukan deportasi bagi pengungsi Rohingya di era pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi ?

1.3. Tujuan Penelitian

Tujuan penelitian ini terbagi menjadi dua, yaitu tujuan umum dan tujuan khusus yang dijelaskan sebagai berikut.

1.3.1. Tujuan Umum

Penelitian ini bertujuan untuk mengetahui kebijakan pemerintah India dalam menerima pengungsi dan proses perubahan kebijakan yang terjadi dalam fenomena deportasi terhadap pengungsi Rohingya.

1.3.2. Tujuan Khusus

Adapun tujuan khusus dari penelitian ini adalah menjelaskan, menganalisis dan mengetahui fakta-fakta yang terdapat dalam kebijakan keterbukaan terhadap pengungsi dan langkah deportasi pemerintah India terhadap pengungsi Rohingya sebagai sebuah perubahan wacana/ *discourse* dan skema proses produksi wacana.

1.4. Manfaat Penelitian

1.4.1. Manfaat Teoritis

Penelitian ini memiliki manfaat dalam memberikan kontribusi akademis, khususnya dalam menganalisis deportasi terhadap Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah India yang menggunakan pendekatan pemikiran analisis wacana dan skema proses produksi wacana sebagai bagian dari ranah kekayaan bahasan fenomena dalam kacamata ilmu hubungan internasional.

1.4.2. Manfaat Praktis

Penelitian ini bermanfaat untuk memberikan gambaran dan analisis yang menjelaskan bahwa sebuah perubahan kebijakan pemerintah India dalam memberlakukan pengungsi yang ditunjukkan melalui fenomena deportasi terhadap pengungsi Rohingya memiliki keterkaitan dengan skema proses produksi sebuah wacana.

1.5. Kerangka Pemikiran

Dalam mencoba menjawab rumusan permasalahan, penulis menggunakan pendekatan Post-Modernis, khususnya pemikiran Post-

Strukturalis dari Michel Foucault yang berkaitan dengan penjelasan mekanisme wacana relasi kuasa dan aspek dari sebuah fenomena. Berangkat dari konsepsi utama yang memuat skeptisisme dari apa yang dianggap sebagai ‘kebenaran’ oleh pandangan umum, model pemikiran Foucault (Potter, 2005) berusaha menganalisis sebuah proses konstruksi dari “rezim kebenaran” dan pengungkapan fakta historis dibaliknya. Penggunaan pemikiran Foucault berusaha memetakan aturan yang mengatur bagaimana sebuah pernyataan tentang konsepsi kebenaran muncul dan dapat menjadi sebuah *Knowledge* atau “Pengetahuan” yang dianggap umum sebagai hasil dari proses mekanisme kuasa dan wacana yang meliputinya (Dreyfus & Rabinow 1982: 17). Foucault sendiri menamai proses ini sebagai *Archeology of Knowledge*, dengan mempertanyakan seberapa objektif kebenaran yang dihasilkan dari sebuah Wacana yang dianggap sebagai kebenaran dan proses historis yang melibatkan relasi kuasa . Model proses pemikiran secara demikian misalnya dapat kita lihat dalam karya-karya Foucault seperti *Mental Health* (1965), *Crime and Its Punishment* (1977), dan *Sexuality* (1990/1978).

Konsepsi kerangka pemikiran post-modernis Foucault tentang teori wacana membantu kita berpikir tentang hubungan antara komunikasi dan politik dan dunia tempat kita hidup, dan meminta kita untuk secara perlahan dan sistematis mengumpulkan potongan-potongan teka-teki yang menjelaskan tentang suatu fenomena sosial (Schneider, 2013). Penulis sendiri memilih penggunaan kerangka pemikiran Post-Modernis Foucault dikarenakan keberadaan sifat penerapan pemikiran yang aplikatif dan terbuka dalam menjelaskan berbagai fenomena masalah. Keberadaan sebuah fenomena isu internasional yang spesifik seperti dalam polemik Rohingya ini tentunya juga memerlukan penjelasan spesifik dan terbuka, dikarenakan sifat masalah yang cenderung kurang dapat dipahami secara mendalam jika melalui konsepsi lain yang sudah ada. Selain itu, keberadaan konsepsi pemikiran yang berbeda dengan studi konvensional lainnya juga memungkinkan penulis untuk lebih terbuka dalam menjelaskan penyampaian fakta hasil penelitian. Adapun, dalam memahami penggunaan pemikiran yang demikian, penulis juga menjelaskan konsep-konsep yang berkaitan demi

mendukung penjelasan analisis dalam skripsi ini. Konsep-konsep ini antara lain terdiri atas:

1.5.1. Pemikiran Foucault Tentang Relasi Kuasa (Power), Wacana (Discourse), dan Kebenaran

Sebelum mengidentifikasi lebih jauh, kita perlu memahami konsep power yang menjadi landasan utama dari produksi sebuah ‘wacana kebenaran’. Michel Foucault (1981), mendefinisikan bahwa kebenaran sendiri merupakan sesuatu yang dibentuk dan diproduksi melalui sebuah proses-proses dan mekanisme-mekanisme berasal dari kekuasaan. Foucault menekankan bahwa “Power” atau “Kuasa” bukan hanya sebagai siapa yang memegang kekuasaan saja, melainkan lebih secara jauh memahami kuasa sebagai “relasi kekuasaan” yang terus bergerak (Foucault 1975: 55). Penjelasan mengenai sebuah “Relasi Kekuasaan” timbul dari adanya perbedaan, ketidaksetaraan, atau ketidakseimbangan (Taylor, 2014). Konsep Power pun bukanlah sebuah properti yang hanya dimiliki secara eksklusif oleh entitas pemerintahan dan negara, melainkan merupakan hal yang beroperasi secara omnipresent di seluruh kehidupan sosial dan selalu memiliki tujuan tertentu dalam kapasitas operasinya (Foucault, 1975: 67). Relasi Kekuasaan pun akan terus berubah, terus-menerus berinteraksi dengan hubungan kekuatan lain yang dapat melemahkan, memperkuat atau mengubah satu sama lain.

Meskipun seringkali istilah *power*/ kuasa identik dengan sesuatu yang bersifat represif, melalui pendekatan relasi-kekuasaan-nya, Foucault kemudian hadir dengan merombak konsepsi umum tersebut dengan memandang *power* sebagai sebuah hal yang mengefektifkan ide tertentu di masyarakat. Hal ini pun menjadi pembeda dengan definisi kekuasaan secara umum, yang kemudian menjadi ciri khusus yang mendefinisikan “kuasa” sebagai hal yang bersifat produktif dalam mengeluarkan sebuah *discourse* (Foucault 1975: 70). Salah satu wujud dari *discourse* misalnya berkaitan dengan konsep *knowledge* (penyusunan pengetahuan), yang merupakan hasil dari mekanisme proses relasi kuasa yang berdasarkan keberadaan

aktivitas, pengalaman, dan fenomena yang berlangsung. Knowledge bukan merupakan unsur yang netral, karena merupakan perwujudan akan kontrol relasi kuasa yang diekspresikan melalui monopoli kontrol sebuah makna tentang apa yang dianggap benar. Walaupun begitu, *relasi kuasa* dan *knowledge* dapat bergerak saling mempengaruhi, saling bertukar tempat, dan bertransformasi secara lebih kompleks dalam kapasitas mekanisme pergerakan yang selalu dinamis. Maka dari itu, kedua unsur yaitu *power* (relasi kuasa) & *knowledge* (pengetahuan yang dibangunnya) merupakan hal yang tidak dapat dipisahkan antara satu dengan lainnya (Foucault, 1990).

Adapun dalam *Archeology of Knowledge*, Foucault (1972), mendefinisikan *discourse* atau wacana sebagai sistem pemikiran yang terdiri dari ide, sikap, tindakan, kepercayaan, dan praktik yang secara sistematis ditujukan untuk membangun sebuah subjek sesuai dengan persepsi dari relasi kuasa. Foucault melacak peran wacana dalam proses sosial yang lebih luas dalam melegitimasi dan berkuasa, menekankan pembangunan suatu konsep yang dianggap sebagai “kebenaran”, dan, bagaimana *discourse* dipertahankan dan relasi kekuasaan apa yang meliputinya. Sedangkan, penyusunan sebuah *discourse* atau wacana dapat diekspresikan melalui penggunaan istilah bahasa, kebiasaan yang berulang, dan dapat berjalan secara efektif melalui relasi kekuasaan (Given, 2008). Penggunaan istilah bahasa misalnya merujuk pada apa yang dianggap sebagai suatu hal benar menurut proses relasi kuasa. Sedangkan, “kebiasaan yang berulang” merupakan medium penerapan *discourse* dengan cara-cara yang bersifat praktik sosial yang diekspresikan di tengah-tengah masyarakat.

Pembentukan sebuah *discourse* menurut Foucault terjadi dalam rentang periode sejarah tertentu, melalui *episteme* (periodisasi dimana wacana pengetahuan dibentuk) yang bersifat khusus, dan ditujukan demi mengatur kelompok-kelompok sosial agar sejalan dengan proses yang dibangun oleh relasi-kuasa (Arribas-Ayllon and Walkerdine, 2008). Premis yang disusun Foucault dalam *Archeology of Knowledge* (1972), juga

menjelaskan bahwa dalam sistem pembentukan *discourse* sangat dipengaruhi secara kuat oleh ‘kuasa’ (yang berjalan tersembunyi) yang kemudian mengarahkan subjek-subjek individual yang kemudian tanpa sadar mengikuti dan mendefinisikan langkah-langkah yang sesuai penggunaan bahasa dan pemikiran dari *discourse* yang berjalan dalam waktu dan periode tersebut. Dalam periodisasi dimana sebuah wacana dibentuk dan berhasil dijalankan, Foucault juga mengidentifikasi apakah sebuah wacana berhasil dijalankan atau mengalami sebuah alur perubahan yang dipengaruhi oleh tren-tren berkembang di masyarakat yang dinamis. Beberapa *discourse* akan mengalami *kontinuitas* (wacana tetap berjalan sebagaimana sebelumnya, akibat kestabilan tren yang terdapat pada masyarakat) atau *diskontinuitas* (situasi ketika *discourse* lama tidak dijalankan sebagaimana dipersepsikan, dideskripsikan, diekspresikan, dan diklasifikasikan sebelumnya, dan terdapat transformasi perubahan tren yang agar *discourse* sesuai dengan tren baru) pun menjadi dua istilah yang merefleksikan keberlangsungan relasi kuasa dalam pembentukan *discourse* di tengah masyarakat (Foucault, 1994). Secara khusus, keberadaan perubahan *discourse* juga dapat disebut sebagai sebuah perubahan wacana. Sedangkan, dalam kapasitas sebagai medium relasi-kekuasaan, Pembentukan *discourse* pun sangat identik dengan proses politik dalam pengambilan sebuah kebijakan (Feindt and Oels, 2005). Palsunya kekuatan politik yang dimiliki oleh mereka yang memanfaatkan relasi-kuasa, menjadi salah satu dasar legitimasi yang kuat dalam mengendalikan penggunaan *discourse* dalam mengendalikan orang-orang baik secara terang-terangan maupun tidak terlihat (Kendall and Wickham, 1998).

Aspek produksi sebuah wacana ini kemudian juga didefinisikan Foucault misalnya dalam proses *governmentality*, di mana proses produksi wacana secara aplikatif dilakukan oleh pemerintah dalam ‘memerintah’ dan mengendalikan tindakan dan persepsi orang-orang (Foucault, 1977). Secara lebih jauh dalam penulisan karya-karyanya, Foucault juga menjelaskan bahwa *governmentality* dapat dimungkinkan dengan mewujudkan opini-opini spesifik yang dibentuk dan dibingkai secara sengaja sehingga

membentuk wacana hegemoni di mana sudut pandang masyarakat didominasi oleh dinamika relasi kuasa/power & wacana/*discourse* yang meliputinya (MacDonald, 2003).

Dalam melihat bagaimana fenomena sebuah *discourse* dapat terbentuk, terdapat satu metode yang dipakai Foucault. Discourse Analysis pun hadir sebagai sebuah metode yang dapat menganalisis secara kritis tentang bagaimana fenomena dunia sosial dapat terbentuk misalnya melalui penggunaan bahasa yang tentunya dipengaruhi oleh berbagai sumber relasi kekuatan yang meliputinya (Given, 2008). Metode ini juga mencoba menjelaskan bagaimana individu memandang dunia, dan mempelajari kategorisasi, hubungan antar individu maupun kelembagaan, ideologi, hingga politik (Wooffitt, 2005). Meskipun memiliki kemiripan tentang penjelasan teori konstruktivisme sosial tentang pemahaman bagaimana masyarakat kita dibentuk melalui proses konstruksi sosial oleh penggunaan bahasa yang merupakan cerminan sifat kuasa, penggunaan *Discourse Analysis* lebih bersifat menyeluruh melihat sebuah fenomena dan kritis dalam menolak konsepsi yang sudah terbangun secara umum. Penelusuran lanjutan yang lebih mendalam dalam melihat apa yang mempengaruhi pembentukan atau perubahan sebuah *discourse* lebih dipahami sebagai variabel pemahaman yang bersifat terbuka dimana proses kategorisasi, relasi yang terjadi antara kuasa, maupun unsur-unsur lain seperti ideologi, kondisi politik, atau unsur lain yang sekiranya dapat memainkan pengaruh.

Adapun dalam kapasitas penggunaan, metode Discourse Analysis yang disusun oleh M. Foucault, setidaknya dapat diuraikan secara sederhana menjadi lima tahapan (Kendall and Wickham, 1998). Tahapan pertama, yang harus dipahami adalah pengakuan sederhana bahwa *discourse* adalah sekumpulan pernyataan yang diatur secara teratur dan sistematis. Adapun, empat langkah selanjutnya dalam menganalisis sebuah *discourse* yang terdiri atas: bagaimana suatu pernyataan (*discourse*) itu dibuat, apa yang bisa dikategorikan sebagai hal yang diperbolehkan atau dilarang, dianggap benar atau salah, diterima dan tidak diterima, bagaimana situasi ruang di

mana discourse dapat disusun, dan bagaimana praktik materi dan diskursif dapat berjalan pada saat bersamaan.

1.5.2. Proses Pembentukan Wacana Menurut Van Dijk

Proses pembentukan wacana dapat dimungkinkan melalui penggunaan unsur linguistik yang disebutkan dengan makna dan tujuan tertentu (Van Dijk 1993: 56). Analisis wacana tidak hanya membatasi perhatiannya pada struktur teks, tetapi juga bagaimana suatu teks diproduksi. Van Dijk menawarkan suatu analisis yang disebut sebagai kognisi sosial. Dalam kerangka analisis wacana van Dijk, terdapat penelitian mengenai kognisi sosial

Dalam melihat tentang bagaimana sebuah konteks tren beredar di masyarakat dapat mempengaruhi penyusunan *discourse*, penulis menggunakan pengembangan metode lanjutan *critical discourse analysis* yang dikembangkan oleh Van Dijk (2009). Secara gamblang ia memberikan penjelasan yang menggenapi konsepsi Foucault tentang penyusunan *discourse*, yang melibatkan pengaruh tren masyarakat melalui sebuah konsepsi tentang *context* / konteks yang didefinisikan sebagai keadaan relevan tentang penggunaan unsur pemakaian istilah linguistik atau tindakan tertentu yang dapat merujuk banyak jenis sifat situasi sosial, di berbagai tingkatan, yang dapat mempengaruhi produksi, struktur, dan pemahaman *discourse*, terlepas dari apakah peserta sadar atau tidak, atau sebagai bagian yang dapat diteliti oleh peneliti yang mencoba mengungkap keberadaan fakta sesungguhnya (Van Dijk 2009: 48). Sebagai bagian dari fungsi dan situasi komunikatif, Van Dijk (2009), pun juga menekankan bahwa konteks pun dapat menjelaskan bagaimana suatu *discourse* diproduksi dan dapat berjalan di tengah masyarakat. Maka dari itu, kapasitas konteks yang berwujud dasar sebagai pemahaman situasional pun sangat bergantung dengan apa dan bagaimana masyarakat memposisikan situasi yang kemudian mempengaruhi keberhasilan sebuah *discourse*.

Alih-alih sebagai hal yang objektif, Van Dijk pun juga menekankan bahwa konteks (seperti halnya pemahaman Foucault tentang *discourse*), merupakan hal yang bersifat subjektif. Keberadaan konteks pemahaman sebenarnya merupakan hal yang bersumber dari pengalaman-pengalaman yang dirasakan oleh individu atau yang merupakan bagian dari kelompok sekalipun, dan sifatnya pun akan sangat bervariasi tentang apa yang pernah menjadi bagian dari situasi kehidupan sosial sehari-hari mereka. Kondisi ini kemudian dapat turut membentuk *sosio-cognitive*⁸, yang berbeda antar individu dan diekspresikan melalui pemahaman maupun tindakan tentang interpretasi situasional terkait pengalaman yang sebelumnya dialami mereka. Selain itu, perlu dipahami juga bahwa sebagaimana situasi sosial dalam masyarakat, keberadaan konteks pun sangat bersifat dinamis dan dipengaruhi oleh perubahan sosial tren kemasyarakatan yang sedang bergulir.

Walaupun kenyataannya pengalaman interaksi individu masing-masing tentang situasi yang dihadapi mereka merupakan bentuk inter-subyektivitas, namun terkadang pengaruh legitimasi dan dominasi tentang interpretasi makna dapat menjadikan definisi situasional seolah-olah menjadi hal yang obyektif. Hal ini misalnya dapat dipengaruhi oleh relevansi dari tiap-tiap pengalaman yang berada pada situasi komunikatif yang tumbuh menjadi interpretasi konteks situasional dominan, kemudian menggeser interpretasi pengalaman individu lain menjadi invalid. Objektivikasi dari sebuah interpretasi yang dominan, kemudian dapat melahirkan apa yang disebut sebagai *mental model* yang menjadi standar perilaku dan persepsi yang kemudian diikuti oleh masyarakat secara kognitif.

1.5.3. Konsep Pengungsi

Pengungsi secara definisi yang mengacu apa yang dibentuk oleh UNHCR adalah individu atau pun kelompok yang terpaksa meninggalkan

⁸ Pemaknaan akan fenomena sosial yang berasal dari pengalaman pribadi, turut membentuk landasan berpikir yang mempengaruhi cara orang yang merasakan pengalaman tersebut mengartikan tentang definisi situasi yang sebenarnya terjadi (Van Dijk, 2009)

negara asal atau tanah kelahiran mereka dikarenakan beberapa sebab seperti misalnya: penganiayaan, perang atau kekerasan (UNHCR, 2000). Definisi serupa juga dikeluarkan oleh Amnesty International (2019) dimana pengungsi sendiri lebih dijelaskan sebagai orang yang telah melarikan diri dari negara asalnya dan tidak dapat atau tidak mau kembali karena ketakutan beralasan dianiaya karena ras, agama, kebangsaan, keanggotaan kelompok sosial tertentu atau pandangan politik. Kemungkinan besar, mereka tidak dapat kembali ke rumah atau takut melakukan hal tersebut. Perang dan kekerasan etnis, suku dan agama adalah penyebab utama pengungsi yang melarikan diri dari negara mereka. Dua pertiga dari semua pengungsi di seluruh dunia berasal dari hanya lima negara: Suriah, Afghanistan, Sudan Selatan, Myanmar dan Somalia (UNHCR, 2019c).

1.5.4. Konsep Pencari Suaka

Konsep tentang pengungsi merupakan konsep umum dan awam yang kerap digunakan dalam melabeli orang-orang yang terpaksa meninggalkan negara asal atau tanah kelahiran mereka dikarenakan beberapa sebab, seringkali memiliki miskonsepsi dengan keberadaan apa yang dinamakan sebagai pencari suaka. Adapun Pencari Suaka atau *Asylum Seeker* merupakan satu atau sekelompok orang yang telah meninggalkan negara asal mereka karena beberapa alasan keamanan seperti penganiayaan dan pelanggaran HAM dengan mencari perlindungan di negara lain, tetapi belum diakui secara hukum sebagai pengungsi dan sedang menunggu untuk menerima keputusan tentang klaim suaka mereka (UNHCR, 2000). Pencarian suaka merupakan bagian integral dari Hak Asasi Manusia. Sehingga keberadaan para pencari suaka merupakan suatu hal yang harus diterima dan dihormati dengan baik oleh negara lain yang didatangi (Amnesty International, 2019).

1.5.5. Konsep UNHCR

Sebagaimana konsepsi pencari suaka dan pengungsi merupakan hal yang memiliki keterpautan dengan konteks pemahaman masyarakat

internasional kontemporer, keberadaan UNHCR sebagai sebuah badan yang menaungi merupakan bagian yang harus didefinisikan secara jelas. United Nations High Commissioner for Refugees atau lebih dikenal sebagai UNHCR merupakan badan Perserikatan Bangsa-bangsa dengan mandat utama berupa perlindungan terhadap para pengungsi, masyarakat yang dipindahkan secara paksa dan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan membantu dalam pemulangan sukarela mereka (repatriasi), integrasi lokal atau pemukiman kembali ke negara ketiga (UNHCR, 2001). UNHCR dibentuk pada tahun 1950, di mana pada waktu itu ditujukan untuk membantu jutaan orang Eropa yang melarikan diri atau kehilangan rumah mereka pasca Perang Dunia Kedua (UNHCR, 1991). UNHCR telah melaksanakan kegiatan operasional mereka di sepanjang abad ke-XXI, dengan membantu penanganan krisis pengungsi besar di Eropa, Afrika, Timur Tengah, Asia, hingga Amerika Latin. UNHCR memiliki keterkaitan dengan landasan hukum internasional seperti Konvensi Pengungsi tahun 1951 dan Protokol Tambahan 1967 (UNHCR, 2005).

1.5.6. Konsep BJP Sebagai Partai Politik

Meskipun polemik pengungsi dalam pembahasannya seringkali dikaitkan sebagai sebuah pembahasan isu internasional yang dikaitkan dengan UNHCR, keberadaan masalah pengungsi sebenarnya juga berkaitan dengan keberadaan proses mekanisme relasi kuasa yang berada pada proses implementasi yang ditujukan terhadap pengungsi dari suatu negara penerima. Dalam hal ini definisi yang sederhana dan terkait dengan rumusan masalah adalah keberadaan BJP sebagai partai politik yang berada dalam struktur kekuasaan pemerintahan India dengan kendali Perdana Menteri Narendra Modi.

BJP (*Bharatiya Janata Party*) merupakan salah satu partai politik bercorak sayap kanan terbesar di India yang didirikan pada tahun 1980 dengan ideologi "*Hindutva*" (Banerjee, 2005). Keberadaan ideologi ini sendiri sebenarnya adalah bentuk definisi dari BJP tentang sebuah filosofi

konsep pembangunan nasional baik secara fisik dan non-fisik sesuai nilai-nilai, adat istiadat, budaya Hindu di India (Malik and Singh, 1992). BJP merupakan partai pemenang dalam perolehan suara mayoritas di Lima Ajang Pemilihan Umum (Lok Sabha) India pada tahun 1996, 1998, 1999, 2014, dan 2019 (Palshikar and Suri, 2014; Shastri, 2019). Partai BJP berhasil mendapatkan suara berkat teknik populisme di bawah figur kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dan aktif menjalankan retorika sayap kanan bersama kelompok hindu nasionalis dalam merebut simpati masyarakat mayoritas Hindu di India.

1.5.7. Populisme Sayap Kanan

Kenaikan BJP sebagai sebuah partai politik yang berkuasa pada masa pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi, tentunya juga melibatkan keberadaan proses implementasi kebijakan yang bercorak populisme sayap kanan. Adapun istilah “populisme” merujuk pada pendekatan ideologi yang dilakukan oleh kelompok politik dan individu yang mencoba mengarahkan "rakyat" yang kemudian menunjukkan perbandingan yang kontras dengan "elit" (Mudde and Kaltwasser, 2017). Upaya populis dapat diterapkan dengan memposisikan “elit” sebagai kelompok yang memperburuk situasi karena dianggap berusaha, sedang, atau telah merampas kedaulatan “rakyat” atas hak-hak, nilai-nilai, kemakmuran, identitas, hingga suara mereka (Albertazzi and McDonnell, 2008). Keberadaan upaya populis memiliki keterkaitan yang kuat dengan kelompok sayap kanan.

Adapun, istilah Sayap Kanan atau biasa dikenali sebagai “*Right Wing*” dapat dijabarkan sebagai 'gerakan sosial yang bertujuan mempertahankan struktur ketertiban, status, kehormatan, atau perbedaan atau nilai sosial tradisional' dibandingkan dengan gerakan sayap kiri yang mencari 'kesetaraan yang lebih besar atau partisipasi politik (Tatalovich, Smith and Ferrari, 2004). Kelompok ini kerap kali dikaitkan dengan kelompok konservatif, dimana diidentikkan atas dasar kesamaan tujuan terhadap penjagaan nilai-nilai sosial tradisional. Sehingga kita dapat melihat “Politik

Konservatif’ sebagai upaya yang dilakukan kelompok sayap kanan untuk mempertahankan hak istimewa dalam hierarki sosial yang ada.

Sehingga dengan mempertemukan kedua definisi yang terdapat pada penjelasan sebelumnya, istilah Populisme Sayap Kanan pun dapat kita definisikan sebagai sebuah ideologi politik yang menggabungkan tema retorika populis dan politik sayap kanan (Eatwell and Goodwin, 2018). Retorika yang disampaikan seringkali terdiri dari atas sentimen anti-elitis, Penjagaan terhadap nilai-nilai konservatif, yang dikaitkan dengan unsur politis “berbicara atas nama rakyat jelata”. Adapun, Seorang populis sayap kanan adalah "seorang pemimpin karismatik yang menggunakan taktik populisme politis demi tujuan melampaui para politisi lain dan elit intelektual, dengan mengklaim menyampaikan suara rakyat melalui istilah “referendum” yang diharapkan menuai sentimen reaksioner dari masyarakat secara luas (Canovan, 1981).

1.6. Metode Penelitian

Dalam sub bab metode penelitian ini berisikan mengenai cara-cara yang dilakukan oleh peneliti dalam melakukan penelitiannya. Sub bab ini juga akan memberikan mengenai gambaran tentang bagaimana desain penelitian yang dilakukan. Penelitian ini berusaha mengungkap fakta dibalik keberadaan deportasi Pemerintah India terhadap kelompok pengungsi tersebut dengan menggunakan konsep pemikiran Foucault tentang analisis wacana. Dalam hal ini, berusaha menyajikan fakta secara terbuka dengan pendekatan wacana relasi-kuasa dan proses produksi perubahan wacana dalam kebijakan terhadap pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintah India yang definisinya tercantum sebagai berikut.

1.6.1. Definisi Konseptual

Definisi konseptual merupakan sebuah batasan konsep yang digunakan oleh peneliti dalam rangka melakukan penelitiannya. Hal ini dimaksudkan agar arah penelitian dapat terlihat dengan jelas serta menghasilkan sebuah analisis yang mendalam tanpa adanya ambiguitas definisi konsep.

1.6.1.1. Relasi Kuasa

Sebagaimana konsepsi relasi kuasa dan wacana merupakan hal yang saling terkait, definisi konseptual yang dapat dijelaskan dari keduanya adalah berupa identifikasi yang mengacu pada proses keterkaitan antara relasi dan wacana itu sendiri. Sebagaimana Foucault tidak mendefinisikan sebuah kuasa sebagai suatu konsep tunggal yang hanya dikuasai oleh negara, sesuatu yang dapat di ukur, sebuah proses relasi-kuasa adalah sebuah proses dinamika kekuasaan yang terdapat di mana-mana dan selalu hadir dalam kehidupan manusia di mana melibatkan struktur di dalam kehidupan sosial masyarakat dan merupakan satu dimensi dari relasi. Sehingga relasi kuasa di sini memiliki satu kesatuan definisi yang bersifat *omnipresent* dan terwujud tidak hanya melalui proses definisi formal tentang apa itu kuasa, melainkan proses relasi & kuasa yang terus berlangsung dan bersifat dinamis. Relasi kuasa pun akan terus berubah, terus-menerus berinteraksi dengan hubungan kekuatan lain yang dapat melemahkan, memperkuat atau mengubah satu sama lain.

1.6.1.2. Wacana

Relasi kuasa juga merupakan sebuah proses produktif di mana memproduksi suatu bentuk hal yang dinamakan sebagai sebuah wacana atau *discourse*. Definisi dari wacana sendiri secara sederhana merupakan sistem pemikiran yang terdiri dari ide, sikap, tindakan, kepercayaan, dan praktik yang secara sistematis ditujukan untuk membangun sebuah subjek sesuai dengan persepsi dari relasi kuasa. Pembentukan sebuah *discourse* menurut Foucault terjadi dalam rentang periode sejarah tertentu, melalui episteme (periodisasi dimana wacana pengetahuan dibentuk) yang bersifat khusus, dan ditujukan demi mengatur kelompok-kelompok sosial agar sejalan dengan proses yang dibangun oleh relasi-kuasa. Wacana misalnya dapat dijalankan dalam bentuk proses ‘memerintah’, di mana proses produksi wacana secara

aplikatif dilakukan oleh proses relasi kuasa pemerintah dalam memerintah dan mengendalikan tindakan dan persepsi orang-orang.

Pembentukan sebuah *discourse* terjadi dalam rentang periode sejarah tertentu, melalui episteme (periodisasi dimana wacana pengetahuan dibentuk) yang bersifat khusus, dan ditujukan demi mengatur kelompok-kelompok sosial agar sejalan dengan proses yang dibangun oleh relasi-kuasa. Sistem pembentukan *discourse* sangat dipengaruhi secara kuat oleh ‘kuasa’ (yang berjalan tersembunyi) yang kemudian mengarahkan subjek-subjek individual yang kemudian tanpa sadar mengikuti dan mendefinisikan langkah-langkah yang sesuai penggunaan bahasa dan pemikiran dari *discourse* yang berjalan dalam waktu dan periode tersebut.

Dalam periodisasi dimana sebuah wacana dibentuk dan berhasil dijalankan, terdapat pula proses yang menunjukkan apakah suatu wacana berhasil dijalankan atau mengalami sebuah alur perubahan yang dipengaruhi oleh tren-tren berkembang di masyarakat yang dinamis. Beberapa *discourse* akan mengalami kontinuitas (wacana tetap berjalan sebagaimana sebelumnya, akibat kestabilan tren yang terdapat pada masyarakat) atau diskontinuitas (situasi ketika *discourse* lama tidak dijalankan sebagaimana dipersepsikan, dideskripsikan, diekspresikan, dan diklasifikasikan sebelumnya, dan terdapat transformasi perubahan tren yang agar *discourse* sesuai dengan tren baru). Secara khusus, keberadaan perubahan *discourse* juga dapat disebut sebagai sebuah perubahan wacana. Sedangkan, dalam kapasitas sebagai medium relasi-kekuasaan, pembentukan *discourse* pun sangat identik dengan proses politik dalam pengambilan sebuah kebijakan. Palsunya kekuatan politik yang dimiliki oleh mereka yang memanfaatkan relasi-kuasa, menjadi salah satu dasar legitimasi yang kuat dalam mengendalikan penggunaan *discourse* dalam mengendalikan orang-orang baik secara terang-terangan maupun tidak terlihat.

1.6.1.3. Kebenaran

Salah satu wujud dari wacana / *discourse* misalnya berkaitan dengan konsep *knowledge* (penyusunan pengetahuan), yang merupakan hasil dari mekanisme proses relasi kuasa yang berdasarkan keberadaan aktivitas, pengalaman, dan fenomena yang berlangsung. Knowledge bukan merupakan unsur yang netral, karena merupakan perwujudan akan kontrol relasi kuasa yang diekspresikan melalui monopoli kontrol sebuah makna tentang apa yang dianggap benar. Walaupun begitu, relasi kuasa, wacana, dan *knowledge* dapat bergerak saling mempengaruhi, saling bertukar tempat, dan bertransformasi secara lebih kompleks dalam kapasitas mekanisme pergerakan yang selalu dinamis.

Proses penyusunan *knowledge* ini merupakan sebuah proses sosial yang lebih luas dalam melegitimasi dan berkuasa, menekankan pembangunan suatu konsep yang dianggap sebagai “kebenaran”, dan, bagaimana *discourse* dipertahankan dan relasi kekuasaan apa yang meliputinya. Foucault melacak peran wacana dalam proses sosial yang lebih luas dalam melegitimasi dan berkuasa, menekankan pembangunan suatu konsep yang dianggap sebagai “kebenaran”, dan, bagaimana *discourse* dipertahankan dan relasi kekuasaan apa yang meliputinya. Sedangkan, penyusunan sebuah *discourse* atau wacana dapat diekspresikan melalui penggunaan istilah bahasa, kebiasaan yang berulang, dan dapat berjalan secara efektif melalui relasi kekuasaan (Given, 2008). Penggunaan istilah bahasa misalnya merujuk pada apa yang dianggap sebagai suatu hal benar menurut proses relasi kuasa. Sedangkan, “kebiasaan yang berulang” merupakan medium penerapan *discourse* dengan cara-cara yang bersifat praktik sosial yang diekspresikan di tengah-tengah masyarakat.

1.6.1.4. Proses Pembentukan Wacana

Dalam mengidentifikasi sebuah proses relasi kuasa dalam mewujudkan wacana tentang definisi sebuah terdapat apa yang disebut sebagai sebuah skema proses produksi wacana. Skema ini berusaha menjelaskan secara lebih detail tentang keterlibatan unsur-unsur yang mempengaruhi bagaimana sebuah wacana dapat dibangun hingga dapat menjadi bagian dari pemahaman yang bersifat umum dan seolah-olah merupakan sebuah ‘kebenaran’ dalam pemahaman masyarakat. Proses produksi wacana setidaknya melibatkan tiga unsur utama yaitu struktur sosial, situasi penyampaian wacana, dan proses kognisi sosial.

1.6.1.5. Struktur Sosial

Struktur sosial dipahami sebagai pihak-pihak yang terlibat dalam produksi wacana yang dapat diwujudkan melalui penggunaan unsur bahasa, retorika, maupun tindakan-tindakan mereka dalam memproduksi wacana tertentu untuk hadir dalam masyarakat.

1.6.1.6. Situasi Penyampaian Wacana

Adapun situasi penyampaian wacana adalah tentang bagaimana sebuah wacana dapat disampaikan dengan baik yang didukung oleh situasi agar dapat berjalan efektif. Situasi ini melibatkan apa yang disebut sebagai situasi latar (yang mana terdapat unsur ruang dan waktu) dan situasi partisipan (yang mana melibatkan peserta / kelompok yang dapat mendukung penyampaian wacana).

1.6.1.7. Proses Kognisi Sosial

Merupakan sebuah bagian dari proses produksi wacana yang menjelaskan tentang bagaimana suatu wacana yang disampaikan oleh struktur sosial dalam situasi penyampaian wacana dapat mempengaruhi pemahaman kognitif masyarakat tentang kesetujuan mereka terhadap wacana tersebut. proses ini dipengaruhi oleh konteks model baik secara

personal maupun sosial, ideologi, wawasan / pengetahuan / cara pandang sosial budaya, dan dinamika tatanan sosial.

1.6.1.8. Pengungsi

Pengungsi pada dasarnya memiliki definisi konseptual yang mengacu kepada mereka yang merupakan individu atau pun kelompok yang terpaksa meninggalkan negara asal atau tanah kelahiran mereka dikarenakan beberapa sebab seperti misalnya: penganiayaan, perang atau kekerasan demi pencarian nasib kehidupan yang lebih baik. Secara konsep legalitasnya, status pengungsi /*refugee* diberikan kepada mereka yang mengajukan status tersebut kepada UNHCR selaku lembaga PBB yang mengurus ranah tersebut untuk selanjutnya memberikan mereka program-program yang berkenaan demi perbaikan nasib mereka.

1.6.1.9. Pencari Suaka

Adapun Pencari Suaka atau Asylum Seeker merupakan satu atau sekelompok orang yang telah meninggalkan negara asal mereka karena beberapa alasan keamanan seperti penganiayaan dan pelanggaran HAM dengan mencari perlindungan di negara lain atau yang disebut sebagai proses pencarian suaka, tetapi belum diakui secara hukum sebagai pengungsi dan sedang menunggu untuk menerima keputusan tentang klaim suaka mereka.

1.6.1.10. UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees atau lebih dikenal sebagai UNHCR merupakan badan Perserikatan Bangsa-bangsa dengan mandat utama berupa perlindungan terhadap para pengungsi, masyarakat yang dipindahkan secara paksa dan orang-orang yang tidak memiliki kewarganegaraan, dan membantu dalam pemulangan sukarela mereka (repatriasi), integrasi lokal atau pemukiman kembali ke negara ketiga.

1.6.1.11. Sebagai Partai Politik

Bharatiya Janata Party atau disingkat BJP merupakan partai politik bercorak sayap kanan terbesar di India yang didirikan pada tahun 1980 dengan ideologi "Hindutva". Partai ini merupakan partai yang berkuasa pada periode sejak 2014 dalam melaksanakan pemerintahan India. Partai ini berhasil mendapatkan suara berkat teknik populisme di bawah figur kepemimpinan Perdana Menteri Narendra Modi dan aktif menjalankan politik sayap kanan bersama kelompok hindu nasionalis dalam merebut simpati masyarakat mayoritas Hindu di Utara India.

1.6.1.12. Populisme Sayap Kanan

Populisme Sayap Kanan pun dapat kita definisikan sebagai sebuah ideologi politik yang menggabungkan tema retorika populis yang mengatasnamakan kepentingan rakyat dan gerakan politik sayap kanan yang berusaha mengembalikan keadaan masyarakat agar sesuai dengan nilai tatanan ke arah konservatisme / penjagaan terhadap tatanan nilai tradisional yang dianggap harus tetap dilestarikan.

1.6.1.13. Hindutva

Definisi konseptual dari "Hindutva" adalah merujuk pada sebuah ideologi yang berusaha menafsirkan dan mewujudkan konsepsi nasionalisme di India sesuai dengan cara pandang dan tata nilai budaya india yang dilabeli sebagai kehinduan. Ideologi ini dicetuskan oleh Vinayak Damodar Savarkar pada 1923 dan menjadi sandaran ideologis dari apa yang dikenal sebagai kelompok hindu nasionalis.

1.6.1.14. Kelompok Hindu Nasionalis

Definisi kelompok hindu nasionalis merujuk pada kelompok berpengaruh yang terdiri dari organisasi-organisasi yang memiliki afiliasi sosial budaya dan politik terhadap bentuk nasionalisme sesuai cara pandang hindu atau Hindutva. Secara umum, organisasi terbesar yang merupakan bagian dari kelompok adalah RSS (*Rashtriya*

Swayamsevak Sangh) yang membentuk kesatuan wadah kelompok yang lebih besar bernama *Sangh Parivar* yang di dalamnya tergabung VHP (*Vishwa Hindu Parishad*), Bajrang Dal, BJP, dan organisasi lain yang membentuk kesatuan tersebut. BJP sebagai partai politik yang berkuasa sejak 2014 juga merupakan bagian dari kapasitas politik kelompok hindu nasionalis.

1.6.1.15. *Hindu Rashtra*

Merupakan tujuan yang hendak menjadikan pembangunan dan konsepsi pembentukan karakter negara India agar sesuai dengan konsep penafsiran “kesatuan sesuai nilai hindu” yang dibangun kelompok hindu nasionalis yang juga berkaitan erat dengan nilai ideologi Hindutva. Pengejawantahan *hindu rashtra* sendiri dimaksudkan untuk melindungi orang-orang Hindu dan budaya mereka dan menekankan bahwa sistem politik dan ekonomi harus didasarkan pada pemikiran asli India daripada konsep yang dipinjam dari Barat.

1.6.2. Definisi Operasional

Definisi operasional merupakan sebuah operasionalisasi dari konsep yang telah dicantumkan pada sub bab sebelumnya. Maka, pada sub bab ini menerangkan mengenai operasionalisasi konsep yang digunakan dalam penelitian.

1.6.2.1. Relasi Kuasa

Definisi operasional dari konsep relasi kuasa dalam penelitian ini merujuk pada proses mekanisme dari apa yang terjadi dalam proses mekanisme kekuasaan yang ada dibalik produksi sebuah wacana tentang deportasi terhadap kelompok Rohingya.

1.6.2.2. Wacana

Wacana dalam konteks definisi operasional dalam penelitian ini merujuk pada segala penggunaan bahasa dan unsur linguistik, tindakan dan aksi-aksi, hingga bentuk kebijakan yang diwujudkan dari hasil produktivitas mekanisme relasi kuasa. Dalam penelitian ini secara khusus, wacana diidentifikasi dalam bentuk kebijakan seperti misalnya kebijakan keterbukaan terhadap pengungsi maupun deportasi terhadap pengungsi Rohingya.

1.6.2.3. Kebenaran

Penggunaan istilah kebenaran dalam penelitian ini memiliki definisi operasional yang erat kaitannya dengan unsur wacana, di mana juga merupakan bagian dari konstruksi wacana yang dapat memproduksi sebuah konsep pengetahuan tentang apa yang dianggap sebagai sebuah kebenaran atau batasan kategoris tentang apa yang berada di luar konsepsi. Konsepsi wacana dalam hal kebijakan deportasi terhadap Rohingya dalam penelitian ini pun juga merupakan bagian dari konstruksi wacana kebenaran yang dijalankan oleh relasi kuasa dalam membentuk wacana.

1.6.2.4. Proses Pembentukan Wacana

Definisi operasional dari skema ini berusaha menjelaskan secara lebih detail tentang keterlibatan unsur-unsur yang mempengaruhi bagaimana sebuah wacana dapat dibangun hingga dapat menjadi bagian dari pemahaman yang bersifat umum dan seolah-olah merupakan sebuah 'kebenaran' dalam pemahaman masyarakat. Proses produksi wacana setidaknya melibatkan tiga unsur utama yaitu struktur sosial, situasi penyampaian wacana, dan proses kognisi sosial.

1.6.2.5. Struktur Sosial

Struktur sosial dalam definisi operasionalnya dapat diidentifikasi melalui aktor-aktor yang terlibat dalam penyampaian wacana. Dalam penelitian ini keterlibatan struktur sosial diwujudkan oleh keberadaan kelompok berpengaruh, elit yang berkuasa, dan insititusi yang secara jelas memproduksi wacana melalui kapasitas mereka masing-masing dengan pernyataan yang menggunakan unsur linguistik tertentu, tindakan-tindakan, maupun aturan atau kebijakan yang menjadi bagian dari skema produksi wacana

1.6.2.6. Situasi Penyampaian Wacana

Situasi penyampaian wacana dalam penelitian ini memiliki definisi operasional yang dibedakan atas situasi latar dan situasi partisipan. Situasi latar diidentifikasi melalui keberadaan situasi waktu maupun tempat yang mendukung pengeluaran sebuah wacana agar dapat diterima dalam suasana yang tepat sehingga dapat berjalan dengan efektif. Sementara situasi partisipan adalah keterlibatan pihak-pihak yang menjadi peserta dari penyampaian wacana tersebut dan kapasitas yang dapat mereka lakukan dalam mendukung sehingga wacana dapat tersampaikan.

1.6.2.7. Proses Kognisi Sosial

Dalam tahap operasionalnya, proses kognisi sosial sebuah wacana agar dapat menjadi bagian umum dari persepsi dan cara pandang masyarakat memerlukan keberadaan unsur-unsur seperti konteks model pemahaman yang mendukung baik secara sosial dan personal, ideologi tertentu, wawasan sosial budaya, dan tatanan sosial. Keseluruhan unsur ini tidak dapat dipisahkan dan dapat saling mempengaruhi sehingga membantu proses penyerapan wacana secara kognitif dalam pemahaman masyarakat secara umum.

1.6.2.8. Pengungsi

Konsepsi pengungsi dalam definisi operasionalnya dalam penelitian ini dapat merujuk pada baik secara definisi UNHCR maupun definisi dasar tentang individu dan kelompok yang melarikan diri dari tanah asal mereka demi mencari perlindungan tertentu di tempat lain atas dasar tujuan keselamatan dan nasib yang lebih baik.

1.6.2.9. Pencari Suaka

Konsepsi pencari suaka dalam definisi operasionalnya disini dapat merujuk pada individu dan kelompok yang melarikan diri dari tanah asal mereka demi mencari perlindungan tertentu di tempat lain atas dasar tujuan keselamatan dan nasib yang lebih baik, tetapi belum mendapatkan status legal dari UNHCR.

1.6.2.10. UNHCR

United Nations High Commissioner for Refugees (UNHCR) dalam tahap operasionalisasi dalam penelitian ini merujuk pada organisasi yang banyak terlibat dalam mengurus pengungsi yang tersebar di seluruh dunia akibat keberadaan konflik yang berlangsung. Dalam penelitian ini, keterlibatan UNHCR terdapat dalam membantu pengaturan terhadap pengungsi asing yang terdapat di wilayah India.

1.6.2.11. BJP Sebagai Partai Politik

Definisi operasional dari dalam penelitian ini merujuk pada keberlangsungan proses mekanisme relasi kuasa yang dijalankan BJP dalam melaksanakan pemerintahan dan keterkaitannya dalam produksi wacana yang diwujudkan dalam kebijakan.

1.6.2.12. Populisme Sayap Kanan

Populisme sayap kanan yang terdapat dalam penelitian ini memiliki definisi operasional tak-tik yang secara spesifik digunakan

oleh BJP dan asosiasi kelompok nasionalis hindu nya dalam mempengaruhi simpati dan cara pandang masyarakat dalam proses pembuatan wacana dalam bentuk kebijakan.

1.6.2.13. Hindutva

Definisi operasional dari “Hindutva” adalah merujuk pada sebuah ideologi yang berusaha menafsirkan dan mewujudkan konsepsi nasionalisme di India sesuai dengan cara pandang dan tata nilai budaya india yang dilabeli sebagai kehinduan. Ideologi ini berperan penting dalam proses mekanisme relasi kuasa yang dijalankan oleh BJP bersama kelompok hindu nasionalis dalam mewujudkan tujuan *Hindu Rashtra*.

1.6.2.14. Kelompok Hindu Nasionalis

Definisi operasional dari kelompok hindu nasionalis merujuk pada kelompok berpengaruh yang terdiri dari organisasi-organisasi yang memiliki afiliasi sosial budaya dan politik terhadap bentuk nasionalisme sesuai cara pandang hindu atau Hindutva. Secara umum, organisasi terbesar yang merupakan bagian dari kelompok adalah RSS (*Rashtriya Swayamsevak Sangh*) yang membentuk kesatuan wadah kelompok yang lebih besar bernama *Sangh Parivar* yang di dalamnya tergabung VHP (*Vishwa Hindu Parishad*), Bajrang Dal, BJP, dan organisasi lain yang membentuk kesatuan tersebut. BJP sebagai partai politik yang berkuasa sejak 2014 juga merupakan bagian dari kapasitas politik kelompok hindu nasionalis.

1.6.2.15. Hindu Rashtra

Merupakan tujuan yang hendak menjadikan pembangunan dan konsepsi pembentukan karakter negara India agar sesuai dengan konsep penafsiran “kesatuan sesuai nilai hindu” yang dibangun kelompok hindu nasionalis yang juga berkaitan erat dengan nilai ideologi Hindutva. Pengejawantahan *hindu rashtra* sendiri dimaksudkan untuk

melindungi orang-orang Hindu dan budaya mereka dan menekankan bahwa sistem politik dan ekonomi harus didasarkan pada pemikiran asli India daripada konsep yang dipinjam dari Barat.

1.6.3. Tipe Penelitian

Penelitian ini penulis menggunakan metode deskriptif. Penelitian ini memberikan uraian deskriptif mengenai suatu permasalahan, atau melukiskan sebuah kejadian yang terjadi. Penelitian dengan metode ini memusatkan perhatiannya pada penemuan fakta-fakta sebagaimana keadaan sebenarnya (Nawawi & Martini, 1966). Dalam penelitian ini penulis mencoba menggambarkan mengenai adanya fakta-fakta yang ditemukan dalam melihat proses pembentukan wacana yang terjadi. Penggunaan metode deskriptif sendiri dalam penelitian ini bertujuan untuk menjelaskan Mengapa pemerintah India yang sebelumnya memiliki kebijakan terbuka terhadap pengungsi, melakukan deportasi bagi pengungsi Rohingya di era pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi?

1.6.4. Jangkauan Penelitian

Penelitian ini berfokus pada deskripsi tentang temuan fakta tentang fenomena deportasi Rohingya yang dilakukan oleh pemerintah India di bawah kepemimpinan PM Narendra Modi pada tahun 2018 dan 2019 dan penjelasan tentang proses produksi kebijakan tersebut sebagai sebuah produksi wacana yang dijalankan oleh relasi kuasa yang memiliki hubungan dengan keberadaan nilai ideologi, keadaan sosial masyarakat yang membentuk proses kognisi sosial kebijakan .

1.6.5. Teknik Pengumpulan Data

Penulis mencari sumber-sumber literatur yang terpercaya melalui jurnal-jurnal internasional yang tersedia melalui laman : Springer & Jstore dan beberapa sumber kredibel melalui situs-situs berita internasional seperti *Aljazeera*, *BBC News*, *The Hindu*, *Hindustan Times*, *Independent* dan sumber-sumber lainnya. Penggunaan beberapa media massa sebagai sumber laporan diharapkan mengungkapkan fakta yang terjadi daripada fakta

subjektif yang kita peroleh apabila hanya menerima satu sumber pemberitaan.

1.6.6. Teknik Analisis Data

Sedangkan dalam hal interpretasi data, penulis menggunakan metode analisis wacana atau lebih dikenal sebagai *Discourse Analysis*. Metode ini dipergunakan oleh peneliti dengan cara mencoba pengungkapan ‘produksi makna’ yang membentuk realitas. Produksi makna atau ‘wacana’ atau ‘diskursus’ ini menjadi fokus penelitian sebab wacana adalah prakondisi bagi tindakan aktor, tentang bagaimana cara pandang aktor terhadap dunia, serta bagaimana segala sesuatu dipandang sebagai suatu hal yang ‘normal’ atau ‘given’ (Neumann, 2008). Penggunaan metode ini dilakukan peneliti dengan melihat relasi antara ‘kuasa’ dan ‘wacana’ dalam kerangka Foucault; yakni mengidentifikasi siapa yang berkuasa dan pengetahuan apa yang ia ciptakan untuk mempertahankan kekuasaannya.

Wacana sebagai produksi dari relasi kuasa sendiri seringkali menggunakan unsur Linguistik atau Bahasa untuk memanipulasi pengetahuan, menciptakan ilusi, menghadirkan mitos, sehingga kelompok resesif cenderung diam (Rokhman dan Surahmat, 2016), keberadaannya dapat digunakan sebagai acuan yang baik dalam mengidentifikasi relasi kuasa-wacana. Bahasa adalah kunci yang menggambarkan bagaimana aktor merepresentasikan realitas wacana yang dijalankan melalui medium bahasa yang digunakan. Sama dengan metode analisis isi, peneliti mengumpulkan data-data dari teks tertulis atau dokumentasi audio-visual lalu mengidentifikasi unsur kebahasaan (kata, frase, tata bahasa, struktur kalimat, metafora, analogi, dan sebagainya) kemudian menafsirkan unsur-unsur ini guna mendapatkan pemahaman tentang ‘dunia’ dalam pikiran aktor. Selain itu, Analisis wacana tidak hanya membatasi perhatiannya pada struktur teks tentang suatu wacana kebenaran, tetapi juga bagaimana suatu teks diproduksi. Interpretasi data dilanjutkan dengan melihat proses pembentukan wacana yang dimungkinkan melalui penggunaan unsur linguistik yang disebutkan dengan makna dan tujuan tertentu (Van Dijk,

1993). Pada penelitian ini, penulis menggunakan konsepsi tambahan penjelasan proses pembentukan wacana yang menggunakan unsur linguistik dijelaskan melalui identifikasi analisis kognisi sosial yang melihat produksi teks wacana, konteks, dan kognisi (kesadaran akan produksi wacana yang mempengaruhi persepsi secara umum masyarakat terhadap wacana yang dikembangkan) oleh Teun Van Dijk.

Dalam menjawab rumusan masalah “Mengapa Pemerintah India Yang Sebelumnya Memiliki Kebijakan Terbuka Terhadap Pengungsi, Melakukan Deportasi Bagi Pengungsi Rohingya di Era Pemerintahan Perdana Menteri Narendra Modi ?”, Penulis akan mencoba melihat fenomena secara umum melalui pengumpulan data-data yang mengungkapkan fakta yang terjadi sebenarnya. Setelah itu diadakan verifikasi dari studi kepustakaan yang ada dengan melihat fakta secara mendalam tentang keberadaan kebijakan penerimaan India terhadap Pengungsi beserta keterkaitannya dengan deportasi terhadap pengungsi Rohingya. Setelah ditemukan verifikasi fakta, maka akan dilakukan penulisan yang menganalisis keberadaan perubahan wacana yang terjadi dalam kebijakan penerimaan pengungsi pemerintah India dalam fenomena deportasi terhadap pengungsi Rohingya. Setelah mengidentifikasi keberadaan perubahan wacana tersebut, penulis kemudian menganalisis bentuk perubahan wacana tersebut melalui proses genealogi yang dapat melihat konteks wacana, proses pembentukannya, dan penggunaan unsur linguistik dan bahasa yang digunakan oleh aktor yang menjadi bagian dari proses mekanisme relasi kuasa. Penyajian fakta-fakta hasil dari penelitian kemudian disajikan dalam bab analisis ini sebagai sebuah rujukan akademis baru dalam memahami bahasan tentang fenomena yang berkaitan dengan topik penelitian ini, khususnya masalah pengungsi secara umum, polemik Rohingya, dan keberadaan aktor selain negara yang terlibat dalam proses mekanisme relasi kuasa dan wacana.

Dari uraian di atas, penulis disini menempatkan Pemerintah India sebagai perwujudan dari konsep Kekuasaan / *Power* itu sendiri. Sementara kebijakan deportasi merupakan bagian dari adanya efek kuasa untuk memproduksi sesuatu yang dapat dikatakan sebagai suatu kebenaran.

Menurut pemikiran Foucault, dibalik keberadaan dari sesuatu yang dianggap “benar” pun tidak dapat dipisahkan dari keberadaan pihak yang memiliki peran kuasa. Oleh karena itu penulis berusaha mengungkap apa yang sebenarnya terjadi terhadap kelompok pengungsi tersebut dengan menggunakan konsep pemikiran Foucault yang berusaha menyajikan fakta secara terbuka dengan penggunaan konsep kebenaran dan kekuasaan yang berusaha menjelaskan adanya perubahan wacana dalam kebijakan pengungsi yang dilakukan oleh Pemerintah India.

1.6.7. Sistematika Penulisan

Dalam penelitian ini disusun menggunakan empat bab. Bab I berisi tentang riset desain penelitian tentang fenomena deportasi terhadap pengungsi Rohingya yang dilakukan oleh Pemerintah India. Bab II diisi oleh penjelasan lebih detail tentang keterkaitan Sejarah keterbukaan terhadap pendatang, Penerimaan India terhadap Pencari Suaka/ Pengungsi yang selalu menjadi kebijakan yang dianggap normatif, penjelasan keterkaitan dengan fenomena deportasi India terhadap pengungsi Rohingya, dan transformasi politik nasionalis hindu yang terjadi di India dalam pembentukan tren yang terdapat dalam masyarakat. Bab III yang berisi analisis menggunakan paradigma Post-Modernisme dengan pendekatan “*Discourse Analysis*” atau Perubahan Wacana dalam menjawab rumusan permasalahan. Sedangkan dalam Bab IV berisi Ringkasan dari Fakta dan Kesimpulan dari penelitian ini.

